

MAJEJAHITAN DAN WANITA BALI BAGAIKAN MATA UANG DARI PERSPEKTIF PENDEKATAN ETNOSAINS

Ketut Darmana

Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Unud

ABSTRAK

I. P e n d a h u l u a n .

Masalah gender mengemuka pada dewasa ini diarena ranah publik, sebagai akibat daripada konsekuensi adanya tuntutan kaum perempuan yang selama ini hegemoni dari pihak kaum pria. Di mata kaum pria, selalu muncul pandangan yang disadari atau tidak disadari, bahwa kaum perempuan dianggap kaum yang lemah, kaum yang berperasaan, kaum yang bertugas untuk mengurus rumah kehidupan tangga dan berbagai sebutan yang lain. Tradisi ini masih nampak sampai sekarang pada kehidupan kekerabatan orang Bali, menganut garis keturunan pihak laki-laki (patrilineal), sebagai pewaris tunggal untuk melanjutkan garis keturunan terhadap hubungan kekerabatan seterusnya (Koentjaraningrat, 1974: 104-107). Implikasinya semua hak dan kewajiban secara sosio-kultural dipikul maupun dipertanggungjawabkan oleh pihak anak laki-laki sebagai generasi penerus. Di sini sudah jelas menunjukkan status kaum perempuan berada di luar hubungan kekerabatan tersebut. Kondisi kehidupan keluarga seperti ini, terutama yang dihadapi bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, anak perempuan memang agak kurang mendapat perhatian bagi orang tua yang menyangkut bidang peningkatan kemajuan pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kehadiran anak wanita bagi orang tua (ayah dan ibu) untuk membantu kegiatan orang tua di dalam keluarga maupun rumah tangga, seperti mengasuh adiknya yang masih kecil, mengangkut kayu bakar, membersihkan perabotan rumah tangga, dan lain-lainnya.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan (dinamika) kemajuan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terutama komunikasi-informasi (media elektronik, di antara TV, handphone, internet dll) sudah memasuki celah-celah kehidupan keluarga tidak hanya merambah di daerah pedesaan. Bersamaan dengan itu, pemerintah pusat maupun daerah menaruh perhatian yang sangat serius di bidang pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai realisasinya anggaran biaya pendidikan seperti diamanatkan dalam UU Sisdiknas maupun UU Guru

dan Dosen sebesar 20 persen. Kondisi ini berdampak terhadap peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (gedung, laboratorium, komputer, balai latihan praktek kerja, dll) bagi anak didik. Dorongan pemerintah yang telah lama mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang disertai dengan bebas biaya sekolah bagi anak kurang mampu, hal ini bisa mengurangi putus sekolah (*drop out*). Oleh karena itu, bagi anak-anak yang telah mengenyam pendidikan dasar 9 tahun diharapkan kedepan (minimal bisa membaca dan menulis) sebagai bekal untuk memperbaiki taraf hidup (kesejahteraan) hidupnya. Di lain pihak pemerintah terus melakukan pengentaskan terhadap buta aksara agar terwujud kehidupan masyarakat bebas bhuta aksara.

Akibat konsekuensi daripada perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ternyata hal ini juga membawa perubahan terhadap pandangan orang tua, sehingga mendorong kemajuan pendidikan bagi anak-anaknya. Diskriminasi terhadap pendidikan anak tidak masih terjadi baik bagi anak perempuan maupun anak laki-laki sekarang ini tidak diketemukan lagi dalam kehidupan keluarga. Dewasa ini bagi orang tua sebenarnya sudah memberikan dorongan dan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anaknya (laki maupun perempuan) untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Namun hal itu sangat tergantung pada kemauan dan keinginan anak bersangkutan, walaupun dorongan maupun bimbingan dari pihak orang tua sudah banyak dilakukan, agar anaknya berguna bagi keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas. Faktor dorongan ini sangat dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan bersangkutan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Orang tua yang telah memberikan kesempatan seluas-luas bagi anak perempuan, secara nyata ternyata membawa dampak bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi kaum perempuan secara keseluruhan. Terbukti pada lembaga-lembaga tertentu (pemerintah, swasta, LSM dll) kaum perempuan bisa menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai top manajemen tidak diragukan masalah kualitasnya. Kondisi ini selanjutnya memberikan angin segar (inspirasi), terjadinya perubahan paradigma pencitraan (*image*) kaum perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terus berdinamika dari ranah privat menjadi ranah publik. Akhirnya muncul wacana kesetaraan jender bagi kaum perempuan yang menyangkut beberapa aspek di bidang sosial-kemasyarakatan, ekonomi, politik dllnya. Secara politis kaum perempuan sudah berhasil memformulasikan tuntutan yang diperjuangkan secara gigih, sehingga

memperoleh kuota 30 persen pada lembaga DPR Pusat maupun DPRD Propinsi/Kabupaten-Kota.

Berdasarkan topik peper ini tentang **“Mejehaitan” dan Wanita Bali bagaikan Mata Uang dari Perspektif Pendekatan Etnosians**. Masalah pokok yang bisa dirumuskan, adalah “mengapa mejehaitan dan wanita Bali bagaikan mata uang? Fenomena budaya yang sebenarnya sangat unik terjadi dalam kehidupan komunitas etnik Bali untuk dinugkapkan, apa sebenarnya yang terjadi berkaitan dengan urusan “jahit-mejehaitan” dalam kontek piranti salah satu “bebantenan” (seajen) untuk “yadnya” bagi umat Hindu di Bali memang melulu sebagai suatu aktivitas yang hanya bisa digeluti oleh kaum perempuan. Bagaimana pula dengan posisi kaum pria memang sama sekali tidak bisa dilibatkan dalam urusan “mejehaitan” tersebut, sehingga muncul pencitraan di dalam masyarakat bahwa pekerjaan “mejehaitan” merupakan pekerjaan monopoli kaum perempuan saja. Tulisan ini masih bersifat rintisan, karena belum ditunjang dengan hasil penelitian lapangan. Oleh karena itu, analisa pendekatan etnosains, ada kecendrungan memahami fenomena budaya itu, lebih banyak dari aspek pemahaman “etik” (penulis) dibandingkan dengan pemahaman dari aspek “emik” (*native speaker*). Di samping itu, lebih banyak ditunjang dari hasil pengamatan (observasi) yang terjadi dalam realitas sosial sebagaimana nampak dalam komunitas umat di Bali. Pemaparan terhadap penjelasn ini lebih jauh, dijabarkan seperti tercermin dalam uraian di bawah ini.

II. Konsepsi “Majejehaitan”, Wanita Bali dan Orientasi Teoritik.

Secara konsepsional “majejehaitan” sebagaimana diungkapkan oleh Agung Mas Putra (1985: 4) merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan bentuk-bentuk dari potongan bahan dedaunan seperti “busung” (daun kelapa yang masih muda atau janur), “selepan” (daun kelapa yang masih hijau), “ron” (daun enau yang masih hijau), “ambu” (daun masih muda yang berwarna putih) dan “ental” atau rontal (daun dari pohon ental masih muda dan memalui proses pengeringan). Secara umum daun tersebut di atas, dalam realitasnya di masyarakat banyak digunakan sebagai sarana upacara/upacara “bebantenan” (sesajen) bagi umat Hindu di Bali.

Daun itu, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang dikehendaki bagi pihak yang mengerjakan sesuai dengan panjang jarak antara ibu jari dengan telunjuk ditambah satu jari melintang (*amusti*). Potongan-potongan daun inilah sekarang dirangkai dengan menjahit menggunakan “semat”, yaitu irisan bambu yang kecil

dengan ukuran minimal 0,1 X 15-50 cm. Ukuran panjang daripada irisan bambu sangat tergantung pada ruas daripada bambu itu sendiri. Pekerjaan memotong daun-daunan yang dilanjutkan menjahit dengan “semat” atau benang disebut “mejejahitan”, sedangkan hasilnya disebut “jejahitan”. Pekerjaan memotong dedaunan untuk mendapatkan sesuatu bentuk disebut “metetugelan” atau “metetuasan” dan hasilnya disebut “tetugelan” atau “tetuasan”. Pekerjaan merangkai menjahit dengan “semat” disebut “ngakit” atau “nyahit” (Mas Putra, 1985: 4).

Wanita Bali, sebagai konsep operasional dalam tulisan mengacu suku bangsa (etnik) budaya Bali. Menurut I Gst. Ngr. Bagus (1975) yang dimaksudkan suku bangsa Bali merupakan suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan kebudayaannya, sedangkan kesadaran itu diperkuat oleh adanya bahasa yang sama (Bagus, 1975: 279). Wanita dapat dipandang dari dua aspek yaitu biologis dan sosial. Domain biologis sangat terkait dengan jenis kelamin, sehingga terpatri dengan ciri-ciri fisik kewanitaan seperti mentruasi, melahirkan, menyusui, istri dan sebagainya. Kemudian domain sosial sangat terkait dengan hak dan kewajiban berdasarkan pranay sosialnya pada ranah publik. Untuk itu, banyak istilah-istilah yang terpatrinya sebagai ibu, pengayom, pengasuh anak yang dilahirkan, kesejukan dalam rumah tangga dan sebagainya.

Orientasi teoritis untuk mengkaji permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, mengacu pada teori budaya yang telah dikembangkan dalam ilmu antropologi. Oleh karena itu pendekatan maupun analisis antropologisnya agak lebih menonjol. Lebih-lebih dengan mengaplikasikan paradigma yang dibangun oleh etnosains. Sebagaimana dipahami paradigma ini berusaha mendeskripsikan budaya, tradisi, keyakinan, masyarakat itu sendiri. Kesadaran pemilik budaya tentang miliknya menjadi pangkal tolak etnosains. Etnosains adalah salah satu teori penelitian budaya yang relatif baru. Kata etnosains berasal dari kata Yunani *ethnos* yang berarti bangsa, dan Latin *scientia* artinya pengetahuan. Oleh sebab itu, etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas budaya. Kemudian ilmu ini mempelajari atau mengkaji sistem pengetahuan dan tipe-tipe kognitif budaya tertentu. Penekanan pada pengetahuan asli dan khas dari suatu komunitas budaya. Menurut Haviland (1985:13) etnosains adalah cabang pengkajian budaya yang berusaha memahami bagaimana pribumi memahami alam mereka. Pribumi biasanya memiliki ideologi dan falsafah hidup yang mempengaruhi mereka mempertahankan hidup. Atas dasar ini, dapat

dinyatakan bahwa etnosains merupakan salah satu bentuk etnografi baru (*the new ethnography*). Etnosains sering disejajarkan dengan etnometodologi. Hanya saja, etnometodologi lebih banyak digunakan pada penelitian sosial, sedangkan bidang budaya cenderung ke arah etnosains. Keduanya memiliki akar dan arah yang kurang lebih sama, yaitu menekan penelitian budaya dari subjek. Melalui etnosains, sebenarnya peneliti budaya justru akan mampu membangun teori yang *grass root* dan tidak harus mengadopsi teori budaya barat yang belum tentu relevan. Penelitian etnosains terhadap fenomena budaya selalu berbasis etno dan atau folk. Pangkal kajian selalu berfokus pada pemilik budaya. Kajian etnosains, tidak lagi memandang budaya dari aspek peneliti, melainkan berlandaskan pengalaman empiris. Budaya diangkat berdasarkan pendapat dari pemilik budaya, tanpa campur tangan peneliti yang berarti. Peneliti tidak bermaksud menilai atau mengeklaim apakah pandangan mereka benar atau salah, tepat atau tidak tepat, dan seterusnya. Tugas peneliti lebih ke arah menjelaskan kepada publik tentang pandangan-pandangan mereka. Peneliti bertugas mensistematisasikan pandangan mereka ke dalam bentuk laporan hasil penelitian. Kehadiran etnosains, menurut Ahimsa-Putra (1985:104) memang akan memberi angin segar pada penelitian budaya. Meskipun hal demikian bukan hal yang baru, karena sebelumnya telah mengenal *verstehen* (pemahaman), namun tetap memberi wajah baru bagi penelitian budaya. Oleh karena, memang banyak peneliti budaya yang secara sistematis memanfaatkan kajian etnosains. Memang belum ada kesamaan pendapat mengenai istilah etnosains dikalangan peneliti budaya. Istilah ini ada yang menyebut *cognitif anthropology*, *ethnographic semantics*, dan *descriptive semantics* (Spradley,). Berbagai istilah ini muncul karena masing-masing ahli memberikan penekanan berbeda, namun hakikatnya adalah ingin mencari tingkat ilmiah kajian budaya. Tingkat ilmiah tersebut dirunut melalui model klasifikasi data yang akurat. Dasar klasifikasi juga menurut pandangan pemilik budaya. Jadi, penelitian ini cenderung ke arah pendekatan naturalistik budaya. Peneliti etnosains sangat menghargai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh *native speaker*. Penutur penduduk asli kemungkinan akan mengungkapkan bahasa asli dan keyakinan asli dengan pengetahuan yang dimilikinya, itulah yang diangkat oleh peneliti. Peneliti tinggal mengkategorikannya. Dengan demikian, andaikata ada makna sebuah budaya, adalah makna yang diberikan atau ditemukan di lapangan. Pengumpulan data juga tidak berbeda dengan penelitian etnografi, menggunakan pengamatan dan wawancara. Setelah data terkumpul,

pengkategorisasian dapat dilakukan oleh peneliti. Kategorisasi tersebut sebaiknya ditunjukkan kepada informan, dan kalau mungkin informan boleh ikut mengklasifikasikan sendiri. Justru klasifikasi informan ini yang lebih asli, dibanding peneliti.

III. Majejahitan dan Wanita Bali bagaikan Mata Uang.

1. Ketrampilan “Majejahitan” Didominasi Kaum Wanita.

Bila diamati secara kasatmata, nampaknya pekerjaan membuat atau mengerjakan yang disebut “mejejahitan” sebenarnya sangat mudah bisa dilakukan bagi setiap orang. Namun dalam kenyataan praktiknya di lapangan bukanlah pekerjaan yang mudah seperti disangka oleh setiap orang. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan “mejejahitan” tersebut. Begitu juga tidak semua kaum wanita/perempuan sebagai ibu rumah tangga akan mampu juga mengerjakan pekerjaan “mejejahitan”. Dibandingkan dengan kaum pria, walaupun ada yang bisa “mejejahitan” pasti jumlah sangat kecil sifat sangat tertutup hanya terbatas dalam lingkungan keluarga. Mengapa demikian, jika kaum pria mengambil pekerjaan “mejejahitan” memang timbul berbagai pergunjungan (cemohan/ejekan) oleh teman sesama kaum pria. Karena memang pekerjaan itu seharusnya memang dikerjakan bagi kaum perempuan atau ibu dalam rumah tangga.

Sebagai bukti yang nampak jelas, tidak ada seorangpun kaum pria yang ikut terlibat “mejejahitan” jika *krama desa* (warga masyarakat) Pekraman menyelenggarakan upacara pada pura *Kahyangan Tiga Desa (Puseh, Bale-Agung/Desa dan Dalem)*. Di sini, bukan berarti *krama desa* (warga masyarakat) dari pihak pria tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Keterlibatan pihak krama (warga) pria pasti sangat dibutuhkan juga karena membuat piranti upacara tersebut, tidak hanya “mejejahitan” saja. Namun masih ada piranti yang lainnya, seperti membuat “penjor”; “kelakat”, “sanggah cucuk” dan sebagainya. Pembagian kerja dalam melaksanakan tugas sudah nampak jelas antara krama istri/luh (perempuan/ibu) dengan krama lanang/muani (pria/bapak). pada desa Pekraman di Bali. Dampak dari adanya pembagian kerja/tugas tersebut pada setiap aktivitas upacara keagamaan bagi umat Hindu dapat berjalan dengan baik. Solidaritas mekanis dalam wujud rasa kebersamaan “menyama braya” (gotong royong) untuk penyelesaian tugas berat maupun ringan dapat dipikul secara bersama. Kerjasama dalam bentuk gotong royong dapat dipupuk dengan baik, sehingga integritas di

antara krama banjar/desa bisa dijaga. Kondisi seperti ini juga sekaligus dapat mencegah terjadinya prasangka-prasangka yang bersifat negatif yang bisa memunculkan disintegrasi di antara “krama desa Pekraman” tersebut.

Jadi pada hakikatnya pekerjaan “mejejahitan” sudah jelas merupakan pekerjaan yang didominasi (monopoli) bagi kaum perempuan (ibu), mengingat pekerjaan ini membutuhkan kehati-hatian, perasaan jiwa yang sabar, didukung pula ketrampilan dan harus memahami sastra-agama yang menyangkut lontar-lontar (tapeni, empu klutuk dll.) yang menjelaskan tentang berbagai jenis banten (sesajen). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, serangkaian dengan proses “mejejahitan” didahului dengan membuat “tugelan” (potongan beberapa helai janur/ron/ental). Kemudian baru dilanjutkan dengan “metetuesan” artinya meringgit janur/ron/ental itu supaya nampak lebih dekoratif. Untuk menonjolkan penampilan estetika, yaitu keindahan seni, sehingga dapat memberikan rasa kedamaian baik bagi sang pencipta maupun bagi penikmat karena sudah dipandang sebagai sebuah karya seni.

Dalam melakukan pekerjaan “metetuesan” ini secara implisit dapat diartikan mendisain (merancang) model-model maupun jenis-jenis “jejahitan” yang ingin dihasilkan, termasuk pula produk keindahan seni. Menurut I.B. Sudarsana (tanpa tahun) mengungkapkan dari keseluruhan model/jenis “jejahitan” itu, apakah bahan diambil dari janur (*busung*), daun kelapa (*selepan*), ron (daun enau) dan ental/rontal (pohon ental) dapat dibedakan bentuknya menjadi 3 (tiga) model/jenis, yaitu: (1) segi empat (swastika); (2) segi tiga dan (3) bundar (windu). Pengklasifikasian jika dipandang secara fungsional-struktural dalam penerapan upacara/upakara banten (sesajen) lebih-lebih jika mengacu pada *deep-structure* (struktur dalam) mengandung makna filosofis yang melandasi agama Hindu yang dianut oleh umat Hindu di Bali. Tulisan peper yang terbatas ini tidak mengungkap masalah tersebut, karena masih membutuhkan wawasan yang lebih mendalam.

Etika (tata cara) dalam “metetuesan”, di samping dibutuhkan kehati-hatian dan ketenangan, karena sebagaimana diketahui pisau yang digunakan untuk meringgit jenis-jenis daun yang disebutkan di atas sangat tajam. Pisau khusus bentuknya agak kecil yang spesial hanya digunakan untuk “mejejahitan”, sehingga hasil daripada hasil “tetuesan” pada janur, ron, ental kelihatan nampak rapi dan bersih pada bagian-bagian yang kena “tetuesan” pisau. Hal ini untuk mencegah agar jangan tangannya sampai terluka, jika sampai tangan itu terluka, sudah barang tentu

mengganggu pekerjaan “mejejahitan” tersebut. Terkait dengan etika “mejejahitan” agar “jejahitan” (hasil produk) tidak salah, maka perlu diperhatikan “iseh” untuk alas *banten biyakala* (biyakaon) dengan alas *banten prayascita* tentu akan berbeda. Oleh sebab itu, “metetuesan” memerlukan latihan dan ketrampilan khusus, jadi tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena berimplikasi terhadap bahan-bahan yang tidak bisa digunakan atau terbuang percuma.

Begitu pula cara menjahit yang pada umumnya menggunakan “semat” yang terbuat dari irisan bambu yang bentuknya agak kecil sebesar sulit yang digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang berada disela-sela gigi. Cara menjahit dengan menusukkan “semat” tersebut untuk merangkai “tetuesan” sehingga membetuk “sampilan” (canang) sesuai dengan jenis-jenis *banten* (sajen). Nama *banten* (sajen), baik mengenai bentuk dan fungsi sebenarnya cukup banyak tetapi tetap mengacu kepada tujuan pelaksanaan upacara itu sendiri. Di sini juga sangat dibutuhkan ketrampilan yang cukup memadai agar jejahitan nampak rapi, potongan “semat” juga nampak merata panjangnya. Selain itu, juga diperhatikan dalam menusukkan “semat” dalam “mejejahitan” (merangkai) “tetuesan” (janur, rontal, ental yang telah diringggit) dilakukan melalui perasaan, agar dalam menusukkan “semat” pada “tetuesan) agar tidak robek mengingat bahan-bahan tersebut sangat tipis, sehingga tekanan tusukkan perlu diukur secermat mungkin. Jika sampai robek, berarti “tetuesan” tidak bisa digunakan lagi.

2. Pendidikan Informal sebagai Landasan dalam “Majejahitan”.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, nampaknya pekerjaan “mejejahitan” tidak bisa dipandang sebelah mata, lebih-lebih ada pandangan yang seolah-olah menyepelekan pekerjaan “mejejahitan” tersebut. Jika dikatakan rumit, ya bisa juga dikatakan seperti itu, karena pekerjaan “mejejahitan” harus dihayati, dipelajari dan juga harus dipahami. Selain itu, “mejejahitan” sebagai bagian dari piranti *banten* (sesajen) yang sesungguhnya sebagai bangunan perwujudan Ida Sanghyang Widiwasa (Tuhan Yang Mahaesa), maka perlu dipahami secara seksama nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bagi umat Hindu di Bali, *banten* (sesajen) sebagai salah satu media (sarana) untuk komunikasi dalam wujud persembahan kehadiran Ida Sanghyang Widiwasa (Tuhan Yang Mahaesa) seperti nampak diselenggarakan dalam berbagai bentuk prosesi upacara. Baik itu diselenggarakan dalam lingkungan pura keluarga (sanggah kembangan, dadya/panti, klan) maupun pura *Kahyangan*

Tiga Desa (Puseh, Desa, Dalem) termasuk pura *Kahyangan Jagat* yang ada di seluruh penjuru pulau Bali. Banten (sesajen) juga berarti korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kehadapan Ida Sanghyang Widiwase (Tuhan Yang Mahaesa) yang disebut “yadnya”.

Urusan “mejejahitan” dalam kehidupan rumah tangga dikerjakan oleh kaum perempuan (anak dan ibu). Proses belajar “mejejahitan” juga tersosialisai dalam lingkungan keluarga, maupun dalam komunitas banjar atau desa pekraman. Sampai saat ini belum ada sekolah formal yang secara khusus mendidik anak-anak perempuan tentang “mejejahitan”. Kalau pendidikan non formal sekarang ini sudah ada memberikan pelatihan tentang “mejejahitan” bagi anak-anak yang berlandaskan sastra-agama. Pendidikan dalam bentuk pelatihan ini masih ditangani oleh yayasan-yayasan yang menaruh perhatian terhadap pengembangan ajaran agama Hindu di Bali. Selain itu, tampilnya “Dharma Wacana” melalui media elektronik (Bali TV) yang diberikan oleh nara-sumber sehingga bisa memberikan wawasan pemahaman luas tentang ajaran agama Hindu yang bersumber dari sastra-agama. Masyarakat, khususnya bagi umat Hindu sebagai pelaku upacara keagamaan dapat mengetahui berbagai jenis banten serta memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sehingga banten (sesajen) yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari orang bersangkutan. Mengingat dalam ajaran agama Hindu sangat bersifat fleksibel, artinya tidak kata harus begini atau begitu. Namun yang harus diperhatikan dalam membuat tetandingan banten tidak boleh dikurangi atau ditambah, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam sastra-agama.

Proses belajar “mejejahitan” sebenarnya terjadi secara alami, karena setiap anak perempuan memang ada tuntutan seminimal mungkin harus bisa “mejejahitan” guna membuat canang yang diaturkan setiap ada rerainan, seperti kajeng kliwon, purnama, tilem, buda kliwon dan sebagainya. Dalam keluarga orang tua, terutama dari pihak ibu sangat bertanggung jawab dan berperan untuk mendidik anak perempuan belajar “mejejahitan”. Disadari atau tidak di sini peranan kaum ibu sebagai awal terjadinya proses belajar untuk melatih anak perempuan “mejejahitan. Belajar “mejejahitan” bagi anak perempuan sudah dilakukan sejak usia dini, diawali dulu dengan membantu ibunya mengambil pekerjaan yang ringan. Sehubungan dengan perkembangan anak semakin dewasa, maka pemahaman tentang “mejejahitan” juga ikut berkembang, sudah barang tentu tidak terlepas dari

dorongan dan perhatian dari pihak ibunya. Selanjutnya semua pengetahuan yang dimiliki oleh ibunya bisa ditranfer kepada anak perempuannya. Hal ini sebenarnya sangat membantu meringankan pekerjaan ibu dalam rumah tangga. Mengingat anak perempuannya sudah bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan “mejejahitan” tersebut. Tradisi belajar seperti ini yang masih berlangsung sampai saat ini di dalam keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi anak (perempuan) yang memiliki kemampuan dan keinginan mengembangkan tentang “mejejahitan” tentu banyak belajar dan berlatih dengan pihak orang lain yang memiliki pengetahuan lebih luas tentang “mejejahitan” tersebut. Namun jangan lupa, bahwa membuat “tetuesan” sangat ditentukan oleh *inner beauty* (bakat seni) dari orang bersangkutan. Kondisi ini sangat mendukung untuk menghasilkan karya seni yang bersifat dekoratif dari hasil “jejahitan” yang disebut “sampian”, seperti misalnya sampaian “jerimpun” yang bisa dibuat anggun, indah dan menawan. Lebih-lebih pada bagian-bagian tertentu diberi warna-warni akan kelihatan sangat dekoratif sekali.

3. Persepsi Masyarakat terhadap keberadaan Kaum Wanita yang “Majejahitan”.

Gambaran mengenai persepsi masyarakat tentang keberadaan kaum wanita yang melakukan pekerjaan “mejejahitan” dalam komunitas keluarga maupun di lingkungan desa Pekraman. Kehadiran kaum perempuan (terutama para ibu-ibu rumah tangga) sangat diharapkan untuk mengambil dan menyelesaikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan. Menurut Koentjaraningrat (1990) menjelaskan secara singkat dimaksud dengan persepsi, adalah unsur-unsur yang mengisi akal dan alam jiwa manusia secara sadar maupun nyata terkandung dalam otaknya. Lingkungan individu ada bermacam-macam sebagai suatu hal yang dialami melalaui penerimaan pancaindra. Alat penerima (reseptor) organismanya yang lain sebagai getaran eter (cahaya, warna), getaran akustik (suara), bau, rasa, sentuhan, tekanan mekanikal (berat-ringan), tekanan termikal (panas-dingin) dan sebagainya. Kemudian hal ini masuk kedalam sel-sel tertentu dibagian tertentu dari otaknya. Di sana terjadi berbagai macam proses fisik, fisiologi dan psikologi yang menyebabkan bermacam-macam getaran dan tekanan tadi diolah menjadi suatu susunan yang dipancarkan atau diproyeksikan oleh individu tersebut menjadi suatu gambaran tentang lingkungan tadi. Seluruh proses manusia yang sadar (*conscious*) maka disebut dengan persepsi (Koentjaraningrat, 1990: 103).

Tidak mungkin dipungkiri lagi, dikalangan komunitas umat Hindu di Bali, kaum perempuan (ibu) tugas untuk mengerjakan “mejejahitan” seolah-olah sudah terpatrit dalam dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, di mana saja atau kapan saja, jika ada anggota kerabat yang melaksanakan upacara “yadnya” sudah pasti kaum perempuan (ibu) yang tampil untuk membuat “mejejahitan” tersebut. Hal ini sudah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada kaum pria (bapak) patut mensyukuri karena berkat kerja mulia kaum perempuan (ibu), sehingga setiap penyelenggaraan upacara bisa berjalan dengan lancar. Walaupun dalam hal ini tidak terlepas dari bantuan kaum pria (bapak) sebagai wujud kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

Muncul semacam pandangan yang di tengah-tengah masyarakat yang menyatakan bahwa karakteristik kepribadian kaum wanita (ibu) sangat relevan atau berhubungan erat dengan karakteristik pekerjaan “mejejahitan”. Sebagaimana diketahui bahwa proses pekerjaan “mejejahitan” harus dilandasi dengan perasaan tenang (tidak emosi), pikiran yang suci, karena berdampak terhadap kesucian daripada “yadnya” itu sendiri, dituntut tingkat kesabaran yang tinggi, dan jiwa yang lemah-lembut, lebih-lebih didukung dengan rasa seni dari dalam (*inner beauty*). Kondisi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan “mejejahitan” yang semuanya itu diketemukan pada kaum perempuan (ibu). Hal ini nampak hasil “jahitan” berupa “sampilan” akan terlihat rapi, bentuknya serasi sesuai ukuran yang dibuatnya, “gegonjeran” sampian dibuat apik dan artistik, sehingga sangat dekoratif.

Jika dalam keluarga tidak ada kaum perempuan (ibu), karena suatu hal (misalnya cerai/meninggal), sudah barang tentu dalam keluarga setiap ada kegiatan upacara keagamaan akan menghadapi kesulitan. Karena akan meminta bantuan tenaga dari pihak keluarga/tetangga yang lainnya. Lebih-lebih untuk melakukan upacara rerainan hadir setiap bulan (35 hari). Kondisi ini sebagai salah satu penyebab orang bersangkutan membeli “canang” atau “banten” untuk diaturn di sanggah/merajan.

IV. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Masalah jender muncul sebagai akibat dari adanya hegemoni kaum wanita (ibu), seiring dengan peradaban manusia semakin maju, memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya yang setara dengan kaum pria pada ranah publik.
2. Komunitas umat Hindu di Bali, pekerjaan “mejahitan” itu dilakukan oleh kaum perempuan (para ibu) sebagai salah satu piranti dari upacara “yadnya”. Oleh karena itu, “mejahitan” suatu bentuk pekerjaan yang hanya didominasi oleh kaum perempuan (para ibu) saja, dan juga tidak mungkin pekerjaan ini dilimpahkan kepada kaum pria (bapak).
3. Persepsi yang bisa dilukiskan bahwa “mejahitan” dan kaum wanita bagaikan mata uang. Hal ini sudah jelas menggambarkan, bahwa posisi pekerjaan “mejahitan” dan kaum wanita (ibu) yang melakukan pekerjaan tersebut sudah menyatu/melekat sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin posisinya itu digantikan oleh kaum pria (bapak).

Daftar Pustaka.

- Artadi, I Ketut., 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Penerbit PT Bali Post.
- Bagus, I G N., 1975. “Kebudayaan Bali” dalam *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia* (Koentjaraningrat, Ed.). Jakarta: Penerbit Djembatan.
- Ester Boserup, 1984. *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Ekonomi* (Penerjemah: Mien Joebhaar dan Sunarto). Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Penerbit PT Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Mansour Fakhri, 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Mantra, I.B., 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Yayasan Dharma Sastra.
- Mas Putra, Ny. I Gst. Agung., 1985. “Mejejahitan di Bali dan Perkembangannya” *Laporan Pertemuan Ilmiah Kebudayaan Bali*, 26-29 Desember 1985. Denpasar: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Bali (Baliologi).
- Moore, Henrietta L., 1998. *Feminisme Dan Antropologi* (Penerjemah: Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI). Jakarta: Penerbit Obor.
- Pudja, I Gede., 1963. *Sosiologi Hindu Dharma*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pembangunan Pura Pita Maha.
- Sudarsana, IB, tt. *Himpunan Tetandingan Upakara Yadnya*. Denpasar: Yayasan Dharma Acarya.
- Sudharta, Tjok Rai., *Manusia Hindu dari Kndungan Sampai Perkawinan*. Denpasar: Penerbit Yayasan Dharma Naradha.
- Swarsi Geriya, S., 1987. “Etos Kerja Sebagai Potensi Budayawi Untuk Meningkatkan Peranan Wanita”, *Wahana Media Pematang Alumni Udayana*, No.:3 Th. II Juli 1987. Denpasar: Universitas Udayana.